



Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal di PKBM Tiara Dezzy Samarinda

Andi Ismail Lukman
Universitas Mulawarman
a.ismaillukman@fkip.unmul.ac.id

Received: 04 September 2021; Revised: 11 September 2021; Accepted: 19 September 2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pemberdayaan yang dilakukan pada PKBM Tiara Dezzy. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*. Tahap penyadaran tidak dilakukan oleh pihak PKBM Tiara Dezzy. Penyelenggara PKBM langsung mendata dan memanggil masyarakat untuk bergabung dan mengikuti program pemberdayaan. *Kedua*. Tahap transformasi pengetahuan, materi/bahan pembelajaran tidak semuanya bersifat potensi lokal. Pelaksanaan pembelajaran atau pelatihan bersifat partisipatif sehingga masyarakat turut aktif dalam pembelajaran, dan jadwal pembelajaran ditentukan sendiri oleh warga belajar. *Ketiga*. Tahap peningkatan pengetahuan untuk kemandirian masyarakat, warga belajar belum mandiri. Akan tetapi, terjadi perbaikan pendidikan dan perbaikan tindakan. PKBM Tiara Dezzy belum melakukan pemberdayaan secara tuntas karena hanya melakukan tahap transformasi pengetahuan. Penyelenggara PKBM memaknai pemberdayaan masyarakat sama dengan pengembangan kapasitas, padahal tidak demikian karena pengembangan kapasitas hanya bagian dari proses pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, pendidikan nonformal, pusat kegiatan belajar masyarakat

Community Empowerment through Non-Formal Education in Tiara Dezzy Community Learning Center Samarinda

Abstract: *This study aims to see the empowerment process carried out at CLC Tiara Dezzy. This research uses qualitative method with descriptive research type. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The results of this study, namely: First. The awareness stage was not carried out by CLC Tiara Dezzy. CLC organizers immediately record and call the community to join and participate in the empowerment program. Second. The transformation stage of knowledge, learning materials/materials are not all local potential. The implementation of learning or training is participatory so that the community is actively involved in learning, and the learning schedule is determined by the learning residents themselves. Third. The stage of increasing knowledge for community independence, learning residents are not yet independent. However, there has been improvement in education and improvement in action. CLC Tiara Dezzy has not done empowerment completely because it only performs the knowledge transformation stage. CLC organizers interpret community empowerment as the same as capacity building, even though this is not the case because capacity building is only part of the community empowerment process.*

Keywords: *community empowerment, community learning center, non-formal education*

How to Cite: Lukman, A.I (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal di PKBM Tiara Dezzy Samarinda. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 180-190. doi:

<https://doi.org/10.21831/diklus.v5i2.43669> 



PENDAHULUAN

Keadaan masyarakat yang tidak mampu untuk bangkit dari ketidakberdayaan menjadi perhatian untuk semua pihak. Penyebab utamanya adalah kemiskinan. Kemiskinan bersifat kompleks. Sebab, tidak semata berkaitan dengan material saja, akan tetapi kemiskinan juga bersifat nonmaterial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Miradj dan Sumarno (2014) bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan kondisi kemiskinan masih sulit untuk diminimalkan. *Pertama*, kondisi anggota masyarakat yang belum ikut serta dalam proses yang berkualitas, faktor produksi yang memadai. *Kedua*, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan. *Ketiga*, pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berprestasi sehingga tidak dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, penanganan atau penanggulangan kemiskinan membutuhkan strategi yang sistematis dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dapat ditempuh agar masyarakat memiliki daya saing dan berdaya guna dalam berbagai segi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Maryani dan Ruth (2019) bahwa pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Lebih lanjut, Supriyanto (dalam Kumalawati dan Dianti, 2016) menyatakan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian atau peningkatan pengetahuan kepada masyarakat terhadap sesuatu untuk

menunjang kehidupannya. Sebab, pendidikan yang rendah atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali menjadi faktor utama ketidakberdayaan. Sejalan dengan itu, Miradj dan Sumarno (2014) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan pusat dalam pembangunan manusia yang cerdas dan berkualitas, dan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya demi kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, pendidikan menjadi jalan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Pendidikan menjadi akses masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya (Laksono dan Nasyikhatur, 2019). Pendidikan bertujuan memberdayakan setiap golongan masyarakat (Ratnasari, Iip, dan Ade, 2012). Pendidikan dalam hal ini adalah Pendidikan Nonformal (PNF) menjelma menjadi pendidikan alternatif yang hadir dengan konsep kemasyarakatan. Pendidikan nonformal dianggap lebih tepat dengan berbagai keistimewannya. Pendidikan nonformal dapat digunakan untuk memerangi kemiskinan dengan membekali keterampilan bagi pengangguran, membentuk perilaku produktif, meningkatkan keterampilan dan membendung arus urbanisasi (Komar, 2006). Menurut UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 4 pendidikan nonformal memiliki berbagai bidang termasuk, pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. Tidak hanya itu, pendidikan nonformal juga terdiri dari berbagai satuan pendidikan termasuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Dari beberapa satuan pendidikan nonformal tersebut, kesemuanya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya untuk masyarakat.

Namun, Satuan pendidikan nonformal yang dimaksud oleh Calon Peneliti yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pendidikan nonformal dalam hal ini PKBM menekankan pemberian pendidikan kepada masyarakat yang tidak terbatas pada akademik semata, tetapi lebih pada pemberdayaan masyarakat agar nantinya dapat mandiri secara materil dan nonmateril. Dikutip dari Petunjuk Teknis Program PKBM (2014), PKBM diselenggarakan untuk memberikan layanan pendidikan nonformal sebagai penambah, pengganti dan pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian, mengembangkan diri untuk berusaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, tujuan dari pembentukan PKBM, yaitu: 1) melayani masyarakat dengan berbagai program pendidikan nonformal yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat sekitar; 2) mendorong masyarakat agar mampu memberdayakan potensial diri dan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas hidup; 3) memberikan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memecahkan masalah kehidupannya. Olehnya itu, PKBM hadir dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga mampu mengetahui kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi untuk kebutuhan tersebut berupa pemberian keterampilan atau pelatihan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerahnya.

Meninjau program PKBM yang sebenarnya sangat efisien untuk memberdayakan masyarakat karena tujuan dan fungsi penyelenggaraannya memang diperuntukkan bagi masyarakat. Akan tetapi, tidak semua PKBM berjalan sesuai dengan harapan.

Salah Satu PKBM yang Peneliti anggap berhasil yaitu PKBM Tiara Dezzy. PKBM Tiara Dezzy merupakan salah satu PKBM terbaik di Samarinda. Pada tahun 2014, PKBM ini dianugrahi juara pertama PKBM berprestasi tingkat nasional. Bukan hanya itu, juga pernah mendapat juara pertama Pengelola PKBM-PTK PAUDNI berprestasi Provinsi Kalimantan Timur, dan prestasi-prestasi lain yang telah diperoleh. Bukan hanya itu, PKBM Tiara Dezzy memiliki beberapa kegiatan berupa pendidikan, pemberdayaan masyarakat, taman baca, usaha perdagangan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal di PKBM Tiara Dezzy. Tujuannya, untuk melihat dibalik prestasi-prestasi yang telah diperoleh, bagaimana proses pemberdayaan atau langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang akan diperoleh dari hasil penelitian dipaparkan sesuai dengan kondisi apa yang terjadi di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moleong (2012) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lebih lanjut Sugiyono (2016) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivism*, digunakan untuk meneliti

pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari generalisasi.

Peneliti mengamati berbagai fenomena, tindakan, perilaku, dan sebagainya dari objek penelitian yaitu semua elemen yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat di PKBM Tiara Dezzy Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, data penelitian yang diperoleh akan diinterpretasikan dan dipaparkan secara deskriptif yaitu menggunakan kata-kata sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Untuk memudahkan penelitian, penentuan informan penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling* (sampel bertujuan) dan teknik *Sampling jenuh*. Sementara itu, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan observasi langsung karena Peneliti terlibat dan berada langsung di lokasi penelitian untuk mengamati terjadinya atau berlangsungnya peristiwa. Observer menggunakan lembar observasi yang sudah dibuat sebelumnya yang menggambarkan, situasi, kondisi, dan aktivitas yang berlangsung sehingga peneliti dapat melihat atau mengamati, mencatat, dan menelaah apa yang terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara secara mendalam agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan menggali informasi secara langsung pada subjek penelitian. Kegiatan wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (pengelola, masyarakat/warga belajar, pamong,) secara sepihak. Selain itu, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara.

Data yang terkumpul berupa data hasil observasi, dan wawancara direduksi berdasarkan masalah yang diteliti, diikuti penyajian data, dan terakhir penyimpulan atau verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016). Setelah itu, Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian diuji keabsahannya dengan melakukan pemeriksaan data terlebih dahulu. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data/sumber dalam melakukan uji keabsahan data. Peneliti mengecek atau memeriksa data yang didapatkan. Uji keabsahan data diperlukan untuk mengetahui sejauhmana data yang diperoleh tersebut sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau sesuai dengan kebutuhan data. Jadi uji keabsahan data membantu dalam mengurangi kemelencengan atau ketidaksesuaian dalam mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal

a. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh PKBM agar masyarakat ingin turut serta dalam proses pemberdayaan. Untuk menarik minat masyarakat, pihak penyelenggara PKBM melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dan berdialog dengan masyarakat agar nantinya program pemberdayaan yang dilakukan sesuai atau sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Pihak penyelenggara PKBM dapat membuat suatu forum untuk berdiskusi dengan masyarakat atau berdialog langsung secara individu *face to face* dengan masyarakat. Dalam dialog atau diskusi tersebut, bujukan, rayuan, penyemangat, dan membuka pikiran oleh penyelenggara PKBM sangat dibutuhkan agar nantinya, masyarakat dapat sadar akan kehidupannya. Kesadaran masyarakat dari

dalam diri sangat penting untuk dibangun agar masyarakat dapat termotivasi dan merasa membutuhkan PKBM sebagai tempat untuk mengubah hidup dan kehidupannya. Masyarakat menjadi sadar akan pentingnya peningkatan kapasitas atau pengetahuan dan memiliki keterampilan tertentu yang akan menunjang ke arah yang lebih baik.

Tahap pertama dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal ini tahap penyadaran tidak terlaksana, prosesnya tidak lengkap karena masyarakat tidak ikut merencanakan dan menentukan sendiri program atau kegiatan yang akan dilakukan. Program sudah direncanakan sendiri oleh penyelenggara. Bukan hanya itu, warga belajar bergabung di PKBM tidak berdasar pada pengkajian masalah yang dihadapi masyarakat. Sebab, masyarakat bergabung dan mengetahui sendiri informasi mengenai program. Ada berbagai alasan masyarakat untuk ikut bergabung dalam program, ada yang hanya untuk mengisi waktu luang dan ada pula yang ingin menambah pengetahuan dan memperdalam keterampilan. Akan tetapi, penyelenggara mampu membuat warga belajar merasa tertarik dan bersemangat untuk ikut bergabung dalam kegiatan. Penyelenggara membentuk dan mengonstruksi pikiran warga belajar sehingga menjadi sadar dan merasa membutuhkan peningkatan pengetahuan dan membutuhkan keterampilan tersebut.

b. Tahap Transformasi Pengetahuan

Tahap kedua dari proses pemberdayaan masyarakat adalah tahap transformasi pengetahuan. Tahap transformasi pengetahuan yang dimaksud adalah tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran didasarkan pada pembelajaran pendidikan nonformal yang terdiri atas tiga bagian, yaitu. *Pertama*, materi atau bahan pembelajaran yang berdasarkan pada potensi lokal. *Kedua*, model pembelajaran partisipatif yang

mampu membuat warga belajar nyaman dan menerima pengetahuan dengan mudah. *Ketiga*, waktu belajar fleksibel yang disesuaikan dengan waktu dari warga belajar karena warga belajar tidak bisa disamakan waktunya dengan anak sekolahan pada umumnya. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai tahap kedua ini.

1) Materi/Bahan Pembelajaran

Bahan ajar keterampilan atau pelatihan yang selama ini diberikan kepada masyarakat sesuai dengan potensi lokal daerah. Bahan atau materi pembelajaran sesuai dengan pernyataan penyelenggara bahwa mengolah, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi lokal sebaiknya dilakukan agar masyarakat nantinya setelah selesai mengikuti program keterampilan dapat mengembangkannya sendiri sehingga dapat memberikan *income* atau penghasilan tambahan kepada masyarakat. Penghasilan tambahan dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa yang namanya lembaga memiliki program tertentu untuk mengembangkan lembaganya sehingga tidak semua program bersifat potensi lokal. Sebab, ada beberapa program yang merupakan program dari pusat, seperti menjahit, perbengkelan, dan lain-lain.

2) Pembelajaran Partisipatif

Pembelajaran partisipatif berkaitan dengan kemampuan tutor dalam menyampaikan materi atau bahan pembelajaran kepada warga belajar. Warga belajar bersemangat dan mudah memahami materi pelajaran. Strategi belajar yang diterapkan oleh tutor diterima dengan baik oleh warga belajar dan warga belajar dapat menikmati proses pembelajaran. Strategi belajar tersebut terdiri dari ceramah dan tanya jawab. Tutor menjelaskan terlebih dahulu materi atau bahan pelajaran, selanjutnya terjadi proses tanya jawab antara warga belajar dan tutor. Warga

belajar bertanya berbagai hal dan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Selanjutnya, proses pembelajaran dilengkapi dengan praktik untuk memperdalam pengetahuan dan memperlancar keahlian warga belajar. Proses pembelajaran yang terjadi sangat partisipatif karena terjadi tidak hanya satu arah. Tutor tidak mendominasi dan tidak memonopoli kegiatan pembelajaran, melainkan mengarahkan agar warga belajar aktif selama proses pembelajaran. Tutor harus mampu mengakomodir semua warga belajar, termasuk masukan atau kritikan dari warga belajar.

3) Fleksibilitas

Fleksibilitas artinya pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kesediaan warga belajar untuk belajar. Masyarakat yang menjadi sasaran pembelajaran adalah masyarakat yang memiliki berbagai macam aktivitas dan kepentingan yang berbeda. Tuturan tutor bersesuaian dengan tuturan warga belajar bahwa jadwal atau waktu belajar disepakati bersama dan disesuaikan dengan waktu luang dari warga belajar. Warga belajar adalah subjek dari pembelajaran sehingga program tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada warga belajar. Transfer pengetahuan bersifat fleksibel. Sebab, terkadang pula waktu belajar tersebut dapat dipindahkan atau diubah dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan.

Terdapat kendala yang dihadapi oleh tutor dalam proses pembelajaran yaitu daya tangkap atau pemahaman warga belajar yang berbeda-beda yang terkadang menghambat proses pembelajaran. Akan tetapi, Berdasarkan pada tiga bagian utama transformasi pengetahuan yaitu bahan/materi pembelajaran yang berdasarkan potensi lokal dan juga beberapa program pusat, pembelajaran yang bersifat partisipatif, dan waktu belajar yang fleksibel dapat disimpulkan bahwa tahap kedua berjalan dengan baik sesuai

dengan tahapan dari proses pemberdayaan masyarakat.

c. Tahap Kemandirian

Tahap ketiga dari tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu tahap kemandirian. Tahap ini berkaitan dengan hasil yang diperoleh warga belajar selama mengikuti kegiatan atau program pemberdayaan. Dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa warga belajar belum mampu mencapai kemandirian. Hanya ada dua tujuan kemandirian yang tercapai, yaitu perbaikan pendidikan dan perbaikan tindakan. Sementara itu, perbaikan aksesibilitas, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan keluarga, lingkungan, dan perbaikan masyarakat masih sangat tidak menunjukkan perubahan. Terjadi perbaikan pendidikan pada masyarakat yang telah mengikuti pelatihan, sebab terjadi peningkatan pengetahuan dari hasil pelatihan. Selain itu, terjadi perbaikan tindakan pada masyarakat karena masyarakat dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan baik dan mampu mengubah kebiasaan masyarakat. Perbaikan aksesibilitas dan perbaikan usaha sebenarnya sudah dilakukan oleh penyelenggara dan tutor, hanya saja masyarakat belum mampu menerapkan informasi yang disampaikan oleh penyelenggara dan tutor sehingga perbaikan itu tidak terjadi pada masyarakat. Penyelenggara dan tutor sudah menyampaikan kepada masyarakat mengenai informasi mitra usaha, sumber modal, dan atau sumber peralatan penunjang usaha, tetapi masyarakat tidak mengembangkan dan tidak mengaplikasikan informasi tersebut sehingga pada akhirnya hanya berupa informasi yang sia-sia yang akibatnya tidak berdampak pada peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggara dan tutor harus tetap memantau, mendampingi, dan tidak

membiarkan masyarakat selepas mengikuti kegiatan atau program sampai masyarakat tersebut benar-benar mencapai kemandirian.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi lebih luas daripada itu karena termasuk juga aspek sosial, budaya, politik, psikologi, dan aspek kehidupan lainnya. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Soetomo (2004) yang mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan meliputi dimensi ekonomi, politik, sosial, dan psikologi. Lebih lanjut soetomo menjelaskan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan diharapkan akan meningkatkan akses kelompok miskin terhadap sumber daya ekonomi, peluang, dan fasilitas ekonomi, serta menaikkan posisi tawar secara ekonomi. Pemberdayaan politik akan meningkatkan akses dalam proses pengambilan keputusan, aktualisasi hak-hak di bidang politik, dan meminimalisasi berbagai bentuk diskriminasi. Pemberdayaan sosial akan membawa dampak pada meningkatnya akses informasi, pelayanan sosial, jaringan, dan relasi sosial, serta menghilangkan marginalisasi. Sementara itu, pemberdayaan psikologis diharapkan akan berdampak pada berkurangnya rasa rendah diri. Pemberdayaan menurut Lukman (2019) bahwa pemberdayaan dilakukan secara bertahap mulai dari individu ke keluarga menuju kelompok dan selanjutnya pada masyarakat luas. Lebih lanjut, Widjajanti (dalam Salman dan Entoh, 2019) mengatakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang berkembang, berdaya, dan mandiri.

Pendidikan nonformal lebih tepat diperoleh masyarakat karena pendidikan nonformal menjadi pendidikan alternatif ketika masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan formal yang sangat eksklusif untuk masyarakat yang serba terbatas. Pendidikan nonformal berkonsep

kemasyarakatan karena semua lapisan, semua kultur, dan jenjang umur masyarakat dapat dilayani. Pendidikan Nonformal membantu masyarakat tertinggal baik secara absolut maupun relatif (Pamungkas, Vevi, dan Wendi, 2018). Sejalan dengan itu, Komar (2006) mengemukakan bahwa pendidikan nonformal dapat digunakan untuk memerangi kemiskinan dengan membekali keterampilan bagi pengangguran, membentuk perilaku produktif, meningkatkan keterampilan, dan membendung arus urbanisasi. Secara gamblang menurut Shofwan, Ghani, dan Trisanti (2019) bahwa pendidikan nonformal bertujuan untuk menyiapkan hidup yang berkualitas.

Pendidikan nonformal terdiri atas beberapa wadah pendidikan untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu wadah pendidikan nonformal. Menurut Rahmat (2018) bahwa PKBM sebagai lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan azas dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lebih lanjut, PKBM merupakan tempat atau panti pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi pedesaan dan atau perkotaan untuk menggerakkan pembangunan dibidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya (Sudjana, 2004). Sementara itu, menurut Tohani (2009) PKBM merupakan suatu tempat kegiatan pembelajaran masyarakat yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan potensi masyarakat dalam mencapai kemajuan pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan aspek-aspek kehidupan lainnya.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal di PKBM Tiara Dezzy mencakup 3 tahapan pemberdayaan sebagai patokan untuk melihat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

1. Tahap Penayadaran

Hasil dari penayadaran menimbulkan terjadinya perubahan dalam diri masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Sudjana dalam Anwar (2007) bahwa dari proses penayadaran akan terjadi berupa: 1) meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tentang peranan dalam pembentukan sumber daya yang produktif, 2) meningkatnya keterampilan untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga, 3) meningkatnya kesadaran mengenai peranan pendidikan dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan 4) meningkatnya kesadaran dan kemampuan untuk saling belajar dalam suatu wadah kegiatan belajar. Seutuhnya penayadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi saat itu. Dengan demikian, akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Proses penayadaran tidak terjadi dalam pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara PKBM tidak berdialog dan berdiskusi dengan masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Aswari (2017) bahwa tahap penayadaran dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan kegiatan komunikasi dialogis. Akan tetapi, penyelenggara PKBM tidak melakukan hal tersebut, melainkan langsung mendata dan memilih masyarakat untuk mengikuti program. Padahal dialog tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dialami atau program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tahap penayadaran sangat penting. Hal tersebut diperkuat oleh Anwar (2007) bahwa proses pemberdayaan melalui penayadaran berarti mengantarkan masyarakat ke gerbang kebangkitan dan menolong mereka beralih dari kesadaran transitif naif kepada kesadaran transitif kritis, serta menggugah kemampuan

mereka untuk ikut menangani proses sejarah yang bergerak ke arah kemajuan. Dampak yang akan terjadi ketika tidak dilakukan proses penayadaran adalah masyarakat akan acuh tak acuh terhadap proses pembelajaran yang terjadi. Selain itu, masyarakat menghadiri pertemuan sesuai keinginannya atau semaunya saja.

2. Tahap Transformasi Pengetahuan

Tahap transformasi pengetahuan berdasarkan pada prinsip pembelajaran pendidikan nonformal yaitu berbasis potensi lokal, partisipatif, dan fleksibel. Hal tersebut dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bahan ajar bersifat potensi lokal agar mudah didapatkan. Model pembelajaran bersifat partisipatif agar masyarakat dengan berbagai latar belakang, seperti usia, daya tangkap, atau belum mengenyam pendidikan formal mudah memahami pembelajaran. Fleksibilitas agar masyarakat dengan berbagai aktivitas dapat bergabung.

Prinsip pembelajaran pendidikan nonformal tersebut diperkuat oleh Amri (2009) dalam transfer pengetahuan kepada pembelajaran, yaitu 1) Konteks lokal, agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka bahan belajar harus digali dari konteks lokal. Bahan belajar harus bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari warga belajar. Mereka yang hidup di daerah pedesaan berbeda dengan kebutuhan belajarnya di daerah perkotaan. 2) Proses partisipatif, program pendidikan harus mampu memobilisasi warga belajar untuk melakukan beragam tindakan atau perbuatan dengan kata lain aktif dalam pembelajaran. Dan 3) fleksibilitas, program pendidikan harus fleksibel, agar memungkinkan untuk dimodifikasi sehingga responsif terhadap minat dan kebutuhan belajar serta kondisi lingkungan harus disesuaikan dengan waktu dan jadwal kegiatan masyarakat.

Pernyataan dari penyelenggara PKBM didukung oleh pernyataan dari tutor bahwa

bahan ajar keterampilan atau pelatihan yang selama ini diberikan kepada masyarakat sesuai dengan potensi lokal daerah. Warga belajar bersemangat dan mudah memahami materi pelajaran. Strategi belajar yang diterapkan oleh tutor diterima dengan baik oleh warga belajar dan warga belajar dapat menikmati proses pembelajaran. Sementara itu, jadwal atau waktu belajar disepakati bersama dan disesuaikan dengan waktu luang dari warga belajar.

3. Tahap Kemandirian

Tahap kemandirian berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperolehnya dalam membentuk inovasi atau kreasi-kreasi dan meningkatkan inisiatif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (dalam Sulistiyani, 2004) menyatakan bahwa masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja, masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan.

Mardikanto (2013) mengemukakan bahwa terdapat sembilan tujuan pemberdayaan masyarakat yang menjadi landasan keberhasilan PKBM dalam memandirikan masyarakat, yaitu perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan keluarga, dan perbaikan masyarakat. Akan tetapi, dari kesembilan tujuan pemberdayaan masyarakat yang dijadikan sebagai tolok ukur, hanya ada dua tujuan yang tercapai dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKBM Tiara Dezzy, yaitu perbaikan pendidikan dan perbaikan tindakan. Sementara itu, perbaikan aksesibilitas, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan keluarga,

lingkungan, dan perbaikan masyarakat tidak menunjukkan perubahan.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat belum mencapai kemandirian secara utuh. Tidak terjadi perubahan yang signifikan pada masyarakat yang telah mengikuti proses pemberdayaan. Penyelenggara PKBM melakukan pemberdayaan baru sampai pada tahap pemberian kapasitas, sementara tahap kesadaran dan tahap kemandirian belum terlaksana. Masyarakat belum mampu memanfaatkan, membuat inisiatif, kreasi-kreasi, dan inovasi yang dapat menunjang hidupnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diperoleh dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKBM Tiara Dezzy tidak berjalan dengan baik. PKBM Tiara Dezzy belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada belum tercapainya tahapan pemberdayaan secara utuh atau lengkap. PKBM Tiara Dezzy hanya sampai pada pemberian atau peningkatan kapasitas berupa transfer pengetahuan kepada warga belajarnya. Sementara itu, tahap kesadaran dan kemandirian belum tercapai. PKBM dikatakan berhasil apabila masyarakat yang menjadi warga belajarnya mencapai kemandirian dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh, mengaplikasikannya, dan bahkan membuat inovasi atau kreasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. Ali Latif, dkk. (2009). *Pendidikan Keaksaraan: Kawasan pesisir dan kepulauan*. Makassar: Pena Press.
- Anwar. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Aswari, Suswarina A. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kerajinan Tangan Eceng Gondok 'Iyan Handicraft' (Studi di Dusun*

- Kenteng, Gadingsari, Sanden, Bantul, Yogyakarta). *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah UNY*. 1 (2).
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus/article/view/23870>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peningkatan Mutu PKBM melalui Permagangan Manajemen bagi Pengelola PKBM*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
- Komar, Oong. (2006). *Filsafat Pendidikan Nonformal*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kumalawati dan Dianita. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Nonformal dan Informal, Yogyakarta, UNY Press, pp. 16-22.
- Laksono, B., A., & Nasyikhatur R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nonformal: Universitas Negeri Malang*, 14 (1).
<http://journal2.um.ac.id/index.php/JPN/article/view/8186>.
- Lukman, Andi Ismail. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Nonformal*. Cirebon: Mentari Jaya.
- Mardikanto, Totok. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public*. Bandung: Alfabeta.
- Maryani dan Ruth Roselin. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Miradj dan Sumarsono. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin, melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Halmahera Barat, *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1 (1).
- Moleong, lexy J. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Pamungkas, A. H., Vevi, S., & Wendi, A. W. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah UNP*. 6 (3).
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/view/101240>.
- Rahmat, Abdul. (2018). *Manajemen Pemberdayaan pada Pendidikan Nonformal*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Ratnasari, S., Iip, S., & Ade, S. A. (2021). Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Kewirausahaan Menjahit di PKBM Bhina Swakarya. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah UNY*. 5 (1).
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus/article/view/37126>.
- Safitri, R. W., Nurhadi, Zulkarnain. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Siaga Aktif Inklusif Keuangan. *Jurnal Pendidikan Nonformal: Universitas Negeri Malang*, 12 (2).
<http://journal2.um.ac.id/index.php/JPN/article/view/2946>.
- Salman, M. A., & Entoh, T. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Industri Pertambangan melalui Penyelenggaraan Program Paket C. *JPPM: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. 6 (2).
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/23626>
- Sudjana. (2004). *Sejarah Perkembangan, Filsafat dan Teori Pendukung, Serta Asas Pendidikan*

- Nonformal*. Bandung: Falah Production
- Soetomo. (2004). *Kemiskinan Petani dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa: melalui Institusi Lokal*. Yogyakarta: UGM Press.
- Shofwan, I., Ghanis, P. W., & Trisanti. (2019). Implementasi Pembelajaran Nonformal pada Sekolah Dasar Quran Hanifah di Kota Semarang. *JPPM: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. 6 (1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/23434>.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava media.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.